BAB I.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap musim penghujan di negara Indonesia yang datang setiap tahun dipastikan menyebabkan banjir, dan tanah longsor di beberapa daerah. Daerah yang semula tidak kebanjiran di musim hujan, pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 justru terendam banjir yang sangat cukup parah, seperti Kalimantan Selatan, Papua, Aceh, Manado, Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mengurangi atau mencegah datangnya banjir dan tanah longsong antara lain: menata saluran air dengan melebarkan dan mendalamkan aliran sungai, menata bantaran sungai dari bentuk abangunanpapun baik yang bangunan liar maupun bangunan resmi, mengembalikan bantaran sungai kepada fungsi aslinya, menanam kembali pohon-pohon di bantaran sungai, menanam kembali pohon-pohon di perbukitan, larangan membuang sampah di sungai dan berbagai usaha yang lainnya.

 Salah satu usaha untuk mengatasi banjir yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah telah menetapkan tiga (3) bidang utama dalam pengendalian banjir, yaitu : (1) penataan ruang, (2) pengembangan sumber daya air, (3) pengembangan prasarana peningkatan pelayanan masyarakat. (sumber : http://www.penataan ruang.net). Penataan ruang khususnya di bantaran sungai di daerah perkotaan merupakan persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Di satu sisi pemerintah ingin menata dan mengembalikan bantaran sungai yang bersih bangunan apapun termasuk bersih dari hunian penduduk, namun disisi lain sebagian masyarakat juga memerlukan tempat tinggal sementara yang murah dan mudah di bantaran sungai tanpa memperhitungkan legalitas bangunan dan resiko kebanjiran ketika musim hujan.

 Hunian di bantaran sungai juga memberikan kontribusi terhadap menyempitnya aliran sungai, mempercepat pendangkalan sungai dan memperbanyak volume sampah yang dibuang di sungai serta membuat bantaran sungai menjadi hunian yang kumuh dan ilegal. Berbagai kebijakan atau program untuk menghapus hunian penduduk maupun di bantaran sungai telah dilakukan oleh beberapa pemerintah maupun pemerintah daerah daerah, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surakarta dan berbagai pemerintah kota atau kabupaten lainnya di Indonesia dengan menata kembali bantaran sungai untuk mengembalikan fungsi semula sebagai aliran air dengan merelokasi warga bantaran sungai ke tempat yang lebih layak, aman dan nyaman

Kota Surakarta telah banyak melakukan kebijakan penanggulangan bencana banjir yang salah satunya adalah merelokasi warga bantaran sungai ke tempat yang lebih baik, aman dan nyaman. Kebijakan program relokasi di kota Surakarta telah dimulai sejak tahun 2009 dengan merelokasi warga bantaran sungai Bengawan Solo yang berada di Kelurahan Pucang sawit, kelurahan Sewu, kelurahan Pasar Kliwon, dan berbagai area bantaran sungai di berbagai kelurahan lainnya di wilayah kota Surakarta. Program Relokasi di kota Surakarta akan terus dilaksanakan sampai semua bantaran sungai yang ada di wilayah kota Surakarta bebas dari segala bentuk bangunan apapun. Program relokasi sebagai bagian dari kebijakan Penanggunalangan Bencana Banjir di Kota Surakarta akan secara kotinyu dilaksanakan untuk menjaga kawasan kota Surakarta bebas dari Banjir atau setidak tidaknya mengurangi bahaya banjir ketika musim hujan tiba.

Program Relokasi Sungai Anyar yang terletak di Kelurahan Nusukan juga tidak luput menjadi target program relokasi di wilayah kota Surakarta, agar kawasan daerah tersebut saluran air menjadi lebih dalam, lebar dan air dengan cepat bisa mengalir dengan lancar, sehingga potensi banjir di kawasan tersebut khususnya seputar sungai Anyar dapat dicegah dan dieliminasi.

Program penataan sungai Anyar untuk mencegah terjadiinya banjir di kawasan tersebut dilakukan dengan menata kembali saluran tersebut seperti sedia kala. Salah satu konsekwensi dari program penataan sungai Anyar adalah memindahkan masyarakat yang menghuni bangunan di lokasi bantaran sungai Anyar ke tempat lain. Salah satu program yang dilakukan pemerintah kota agar penataan sungai kali Anyar berjalan dengan baik dan lancar maka memindahkan atau merelokasi warga penghuni bangunan di bantaran sungai tersebut menjadi satu alternatifnya.

Relokasi warga bantara sungai kali Anyar yang berada di kelurahan Nusukan dilakukan sejak tahun 2017 dengan merelokasi warga yang tinggal dibantaran sungai tersebut sejumlah 194 bangunan. Warga bantaran sungai kali Anyar yang dipidahkan atau direlokasi menempati lokasi di luar wilayah kota Surakarta. Mereka menempati wilayah di kabupaten Karangnyar, kabupaten boyolali dan Kabupaten Sukoharjo dengan pertimbangan bahwa wilayah kota surakarta sudah tidak lagi mampu menampung warga yangdirelokasi dengan anggaran yang terbatas. Nilai tanah diwilayah kota Surakarta sudah tidak lagi terjangkau dengan anggaran yang diberikan terkait program relokasi, sehingga alternatifnya adalah mencari lokasi yang masih terjangkau oleh pembiayaan program relokasi, yaitu wilayah yang berada di luar kota Surakarta.

1. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak program relokasi warga bantaran kali Anyar di kelurahan Nusukan kecamatan Banjarsari Kota Surakarta ?
2. Tujuan Penelitian

 Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak program relokasi warga bantaran sungai Anyar di kelurahan Nusukan Kota Surakarta
2. Luaran yang Diharapkan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan luaran yang berupa :

1. Artikel ilmiah di jurnal refanas

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan “*whatever governments choose to do or not to do”* segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah, yang dikerjakan ataupun yang tidak dikerjakan (Thomas Dye, 1978). Berbeda dengan pendapat Easton, kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat, sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah merupakan pengalokasian nilai kepada masyarakat. Kebijakan Publik adalah suatu ilmu yang membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan disusun dan didefinisikan dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan politik. Atau studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan akttif dan pasif pemerintah (Heidenheimer dalam Wayne Parson, 1998).

1. Evaluasi Kebijakan Publik

Dunn (2014) menyebutkan bahwa evaluasi dapat dilakukan sebelum maupun setelah kebijakan dilaksanakan yang disebut dengan evaluasi summatif dan evaluasi formatif. Evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi (Dunn,1984: 278), yaitu :

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrat maupun pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Auditing, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga,organisasi, birokrasi desa) yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan. Tidak adakah penyimpangan dan kebocoran
4. Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat atau dampak sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Khandker, Koolwal, dan Samad (2010) juga membedakan dua evaluasi, yaitu evaluasi operasional dan evaluasi dampak. Evaluasi operasional berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan program sesuai dengan tujuan awal program. Evaluasi dampak adalah upaya untuk memahami apakah ada perubahan dalam kesejahteraan karena memang ada intervensi proyek atau program. Secara khusus, evaluasi dampak mencoba untuk menentukan apakah dimungkinkan untuk mengidentifikasi dampak program dan sejauh mana dampak diukur dapat dikaitkan dengan program dan bukan karena penyebab lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. **Tipe Penelitian**

Penelitian, pada umumnya dapat digolongkan ke dalam tiga tipe yaitu :

* 1. Penelitian penjajakan ( eksporatif) ; bersifat terbuka, masih mencari-cari belum mempunyai hipotesis.
	2. Penelitian penjelasan (eksplanatory) : menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan
	3. Penelitian deskriptif : penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu, dan biasanya dilakukan tanpa hipotesis yang telah dirumuskan secara ketat. (Singarimbun, Effendi, 1985 : 3-4)

Sugiyono (2010) mengelompokkan penelitian menurut metode menjadi menjadi beberapa metode, yaitu : metode penelitian survey, metode ex post facto, metode experimen, metode naturalistik, metode policy research, metode action research evaluasi dan dan metode sejarah. Penelitian ini ingin menggambarkan atau mengungkapkan secara jelas keadaan di lapangan mengenai dampak kebijakan relokasi. Oleh karena itu jenis penelitian yg penulis gunakan adalah penelitian evaluasi. Menurut Sugiono (2003 : 9) dalam hal khusus penelitian evaluasi dapat dinyatakan sebagai evaluasi tetapi dalam hal yang lain juga dapat dinyatakan sebagai penelitian. Sebagai evaluasi berarti hal ini merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar program yang telah ditetapkan. Menurut Kiddler (1981: 84) terdapat dua jenis dalam penelitian evaluasi yaitu penelitian evaluasi formatif yang menekankan pada proses dan evaluasi sumatif menekankan pada produk.

1. **Lokasi penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

1. **Teknik pengambilan informan**

 Informan adalah orang-orang yang dianggap mengetahui suatu fenomena yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam menggali dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informasi awal penelitian ini dipilih secara *purposive* sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan keterangan, informasi maupun data. Pemilihan informan secara *purposive* ini dengan pertimbangan dan tujuan-tujuan tertentu yang menurut Maxwel (dikutip Alwasilah, 2002 : 147-148) terdapat empat tujuan yaitu : pertama , karena kekhasan atau kepresentatifan dari latar, individu atau kegiatan. Kedua, demi heterogenitas dalam populasi. Ketiga, untuk mengkaji kasus-kasus yang kritis terhadap teori-teori yang ada. Keempat, mencari perbandingan untuk menjelaskan perbedaan antara latar, kejadian atau individu.

1. **Teknik Analisis Data**

Secara garis besar tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterprestasikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan tetapi lewat interprestasi data. Spradley (1980) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi : Analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural. Demikian juga Nugroho (2013) mengemukakan bahwa teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kebijakan adalah analisis kualitatif, analisis isi kualitatif, analisis sistesis terfokus dan analisis data sekender. Keempat analisis tersebut dilakukan secara bersamaan (simultan) sesuai jenis data yang sedang dianalisis.

Pertama, analisis kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model Mile Huberman dan Saldana yang dikenal dengan analisis interaktif atau melingkar dimana analisis sudah dilakukan pada saat awal penelitian hingga pada saat akhir penelitian (penulisan laporan), yang terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu: kodensasi data, display (sajian data) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi ((Miles & Huberman, Saldana, 2014)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak ekonomi bagi Rumah Tangga atau individu

Program relokasi warga bantaran sungai kali Anyar di kelurahan Nusukan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 yang memindahkan 194 bangunan yang dihuni oleh lebih dari 194 kepala keluarga. (satu bangunan ada yang dihuni lebih dari satu KK). Dalam jangka pendek program relokasi secara ekonomi memang berat dirasakan oleh individu atau keluarga. Kehilangan mata pencaharian, jarak yang jauh dari tempat kerja merupakan dampak langsung yang dirasakan keluarga penghuni bangunan di kali Anyar yang telah direlokasi. Di tempat lokasi yang baru, ekonomi keluarga yang belum tertata, biaya transportasi yang lebih banyak, merupakan hal terberat setelah program relokasi dilaksanakan. Hal ini seperti yang dikatakan salah satu warga sebagai berikut :

 Keika menempati lokasi baru di luar kota Surakarta beban ekonomi semakin berat, jarak yang lebih jauh dari tempat kerja memaksa biaya transportasi meningkat,baik untukke tempat kerja maupun transportasi anak ke sekolah. (wawancara dengan warga)

1. Dampak ekonomi bagi masyarakat sekitarnya setelah program relokasi

Bagi masyarakat kali Anyar setelah program relokasi dilaksanakan adalah adanya peluang membuka usaha baru, setelah warga bantaran sungai meninggalkan huniannya sekaligus meninggalkan tempat usahanya. Penataan kali Anyar bagi warga sekitarnya sangat memunyai nilai yang positip bagi bergeraknya roda ekonomi masyaraat di sekitarnya. Kali Anyar yang sudah tertata rapi dan bersih membuat banyak pengunjung yang datang, yang konsekwensinya bisa membuat peluang usaha baru, seperti membuat warung makan dan minum. Hal ini dikatakan salah satu warga sebagai berikut :

Saya yang tinggal di dekat kali Anyar merasa senang dengan proram relokasi, lingkunga menjadi bersih, dan bisa menimbulkan peluang pembuakaan usaha-usaha baru. Saya mempunyai warung makan di depan rumah, dengan program relokasi warung makan saya bertambah omsetnya.

1. Dampak ekonomi bagi organisasi (Pelaksana Program)

Program relokasi kali Anyar dilakukan pemerintah kota Surakarta dengan penanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (DPUPR) Kota Surakarta. DPU PR sebagai pelaksana program relokasi kali Anyar, dalam melaksanakan programnya tidak bisa lepas dari kerja sama dengan institusi lain yang membawahi langsung lokasi program relokasi. Pemerintah Kelurahan Nusukan sebagai lokasi yang menaungi program relokasi kali Anyar tentunya saangat berperan strategis dalam menangani program relokasi. Pemerintah kelurahan bersama dengan tokoh masyarakat yang terkena dampak program secara terus menerus mensosialisasikan program relokasi sampai dengan pemindahan warga bantaran sungai kali Anyar selesai dan tuntas meninggalkan lokasi di bantaran sungai.

Sebagai penangung jawab program relokasi tentunya DPUPR beserta jajarannya merasa lega dan bersyukur bahwa pada tahun 2017 telah bisa merelokasi warga bantaran sungai Anyar ke tempat lain. Program relokasi kali anyar telah menyelesaikan satu permasalahan permukiman kumuh di bantaran sungai yang menyebabkan banjir di lokasi disekitarnya, akibat tidak bisa menampung debit air yang meluap ketika musim hujan tiba.

Dengan direlokasinya warga yang tinggal di bantaran sungai, DPUPR bisa dengan mudah melaksanakan program pembangunan penataan dan pelebaran aliran sungai Anyar agar aliran sungai tersebut menjadi lancar dan tidak menimbulkan genangan sehingga banjir di sekitar lokasi kali anyar bisa teratasi.

Program relokasi di satu disi harus memindahkan bangunan sebanyak 194 hunian yang berada di bantaran sungai ke tempat lain, di satu sisi pemerintah ingin mewujudkan kesejahteraan bagi warga sekitarnya, agar tidak terdampak banjir akibat meluapnya air sungai Kali Anyar.

Dengan di relokasinya warga bantaran sungai kali Anyar dan ditatanya saluran air tersebut, maka aliran sungai kali Anyar tidak lagi tersumbat dan terhalangi oleh bangunan apapun, sehinga aliran sungai menjadi lancar dan banjir di sekitar lokasi Kali anyar sudah tidak lagi terjadi.

1. Dampak sosial bagi rumah tangga/individu

Program relokasi warga bantaran sungai kali Anyar pada tahun 2017 diakui memang meninggalkan beberapa persoalan sosial bagi warga yang direlokasi. Warga yang direlokasi merasa kehilangan komunitas sosialnya sebagai warga bantaran sungai kali anyar akibat dipindahkannya warga bantaran sungai ke berbagai lokasi yang berbeda. Warga yang direlokasi merasa kesepian dan harus menyesuaikan dengan lingkungan baru akibat menempati lokasi baru dengan lingkungan sosial yang baru. Perasaan terpisah dari komunitas sebelumnya yang telah terjalin puluhan tahun menjadi warga yang direlokasi sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Lingkungan baru yang sama sekali berbeda dengan lingkungan lama, memaksa warga yang direlokasi harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, lingkungan sosial, komunitas baru yang jauh berbeda dengan lingkungan asalnya yang jauh lebih baik. Di satu sisi warga yang direlokasi harus meninggalkan kebiasaan yang tidak baik (minum-minuman, judi, sabung ayam) di satu sisi warga yang direlokasi secara per lahan-lahan harus mengikuti kebiasaan atau budaya di tempatyang baru.

1. Dampak Sosial bagi Warga Sekitar kali Anyar

Warga sekitar kali anyar merasa bersyukur atas penataan aliran sungai kali Anyar dan direlokasinya warga yang menghuni bantaran sungai tersebut. Dengan ditatanya aliran sungai kali Anyar, aliran sungai menjadi lancar, bersih, rapi dan tidak meluap ketika musim hujan ke wilayah sekitarnya. Masyarakat sekitar kali Anyar sudah tidak lagi merasakan rasa was-was ketika musim hujan tiba. Masyarakat sekitarnya merasa senang aliran sungai kali Anyar menjadi lancar, bersih dan rapi serta bebas dari bangunan liar yang sebelumnya bantaran sungai tersebut penuh dengan bangunan ilegal sebagai tempat tingal dan terkesan sangat kumuh dan kotor. Hal ini seperti yang dikatakan salah satu warga yang tinggal di sektar kali anyar sebagai berikut :

 Sebelum kali anyar ditata dan penghuni bantaran sungai direlokasi rumah saya ketika musin hujan lebat dan lama pasti kebanjiran, akibat sungai Anyar tidak lagi bisa menampung debit air yang cukup lebat dan deras, namun setelah penataan aliran sungai dan masyarakat di bantaran sungai tersebut direlokasi maka rumah saya dan para tetangga sudah tidak lagi kebanjiran dan ketika musin hujan tidak lagi was-was akan datangnya banjir. (wawancara dengan warga skitar kali Anyar)

1. Dampak Sosial bagi Pemerintah Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Alwasilah, A Chaedar, 2002, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan melakukan Penelitian Kualitatif*, PT. Dunia Pustaka Jaya dan Pusat Studi Sunda, Bandung.

Dunn, William, 2014, *Public Policy Analysis, Fifth Edition, Pearson Education Limited*, Edinburgh Gate, Harlow, England and Associated Companies throughtout the word.

Dye, Thomas R. (1975), *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff, NJ: Printice-Hall 2 nd ed.

Khandker R. Shahidur, Koolwal B. Gayatri, Samad A. Hussain, 2010, *Handbook on Impact Evaluation Quantitatif methods and Practices,* The word Bank Washinton DC.

Mile B Matthew, Huberman A.Michael and Saldana. Johny, 2014, *Qualitatif data Analysis*, Edisi 3, Sage Publication.Inc.

Singarimbun , Masri & Effendi Sofian, 1985, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta

Sugiyono, 2010*, Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan ke-18, Alfa Beta , Bandung.